EQUITY: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
ISSN: 0216-9533 (Print)
ISSN: 2549-6182 (Online)

EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Lola Novita
Sekolah Tinggi IlmuEkonomiWira Bhakti Makassar
e-mail: lolanov71@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the regional financial accounting system at BPKD West Manggarai Regency. This type of research is descriptive qualitative. The source of the data used is the primary source, namely information that comes from direct observation to the research location by means of observation and interviews. While secondary sources are data obtained from documentation or literature study to complement primary data. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the application of the accounting cycle at the BPKD of West Manggarai Regency has been in accordance with the established guidelines. All stages of the cycle have been executed properly. Likewise, the completeness of the financial statement items is in accordance with the provisions of the SKPD financial statements which consist of budget realization reports, reports on changes in excess budget balances, operational reports, reports on changes in equity, balance sheets, and cash flow reports.

Keywords: *Accounting System, Information System, Finance SIMDA*

History of article	*Received: 20-10-2021*	*Reviewed: 30-10-2021*	*Revised: 20-11-2021*	*Accepted: 14-12-2021*	*Published: 30-12-2021*

PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian dari berbagai pihak semenjak era reformasi. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan baru dari pemeritah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa pendelegasian kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan melalui mekanisme perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah.

Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Otonomi daerah yang luas yang telah diberikan kepada daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mencapai *good government governance*.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berisi dan menginstruksikan kepada pemerintah daerah segenap unsurnya untuk segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya. Sejalan dengan maksud. tersebut, Menteri Dalam Negeri telah menyempurnakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. Pemendagri tersebut memuat pedoman dalam implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dimana SAKD sudah menggunakan metode pencatatan *double entry* dengan sistem akuntansi berbasis kas yang selanjutnya dimodifikasian mengarah kepada basis akrual (*accrual basis*), sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sehingga dalam penyusunannya sangat diperlukan sistem akuntansi yang baik, yang dapat mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami dan tetap mengutamakan pertanggungjawaban.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan pengguna sebagai bahan pengambil keputusan. Penerapan sistem akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja pemerintah sehingga penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Andivo dan Silvera (2020) bahwa Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011, mulai dari perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran, laporan realiasasi pendapatan dan belanja, serta laporan tahunan. Untuk Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan telah menerapkan laporan pertanggungjawaban secara transparan, cepat, akurat, dan relevan serta dapat dipertanggung jawabkan tepat pada waktunya. Senada dengan temuan Nukak et al., (2021) bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan yang secara komputerisasi menggunakan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, ternyata mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, akurat, dan dapat d dipertanggungjawabkan. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan tata laksana yang baik dapat diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Begitu pula dengan dengan temuan Zarzani (2020), yang menyimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disampaikan secara transparan, andal dan relevan serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut. Untuk itu perlunya implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daearah (SAKD) yang memadai. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Edi dan Sabran (2020) bahwa penerapan program aplikasi SIMDA Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-toli dapat diketahui hasilnya sangat membantu dalam pengelolaan data informasi keuangan pada dinas tersebut sehingga menjadi lebih tepat dan akurat.

Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja demi terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dalam rangka mendukung visi dan Misi Kabupaten Manggarai Barat dan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang susunan organisasi pemerintah, dan dilahirkan tugas pokok BPKD Kabupaten Manggarai Barat yaitu membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pegelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Sujarweni (2019), mengemuk sistem adalah kumpulan grup dari subsistem, bagian komponen apapun, baik fisik ataupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Menurut Sumarso (2018), akuntansi sebagai fungsi organisasi secara sistematis, dapat dipercaya dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterprestasi seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya. Baridwan (2018), dalam bukunya mengutip pengertian akuntansi menurut *Accounting Principles Board*, yang mana akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam membuat pilihan-pilihan ekonomis yang nalar diantara berbagai alternative arah tindakan, sementara Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan akuntansi sebagai proses identifikasi, Pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dankejadian keungan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Menurut Munawir (2018), sistem akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan di bidang keuangan. Sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan, (Sujarweni, 2019). Akuntansi dalam hal ini harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian intern dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan, dan sebagai sarana untuk menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan atau instansi terkait.

Menurut Baridwan (2018), menyatakan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses penidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang diperlukan. Sedangkan menurut Soemarso (2018), akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) banyak menyatakan merupakan terminology lama, pada perkembangannya bergeser istilah akuntansi sektor publik, istilah ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi pemerintah merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah menurut PP No. 71 Tahun 2010.

Sistem Akuntansi Pemerintah diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntansi pemerintah pusat maupun daerah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut: 1) Sistem pemerintahan, dalam sistem monarki/kerajaan akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi

oleh raja jika dibandingkan dengan parlemen, 2) Sifat sumber daya, sumber daya akuntansi pemerintahan bersifat tidak berhubungan langsung denagn hasilnya, 3) Politik, akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh politik.

Dibentuknya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk akuntabilitas, manajerial dan pengawasan yang hasil akhir dari siklusnya adalah informasi keuangan. Kegunaan anggaran menurut Munawir (2018) dapat dibagi atas: 1) Kegunaan anggaran secara umum: a) Memberi arahan atas kegiatan atau aktivitas yang akan dikerjakan sehingga akan menjadi terarah pada tujuan yangdikehendaki, b) Akan menjadi alat koordinasi antar bagian yang melaksanakan kegiatan, c) Anggaran akan dapat mengharmoniskan atau mensinkronkan antar bagian yang ada dalam organisasi, d) Anggaran akan dapat membatasi kegiatan atau aktivitas hanya pada yang penting dan perlu, e) Anggaran dapat dijadikan alat pengawasan organisasi dengan adanya anggaran maka setiap penyimpangan yang ada akan lebih mudah diukur sehingga berbagai tindakan perbaikan dapat diambil, f) Penggunaan metode, alat, tenaga kerja akan semakin efektif danefisien sehingga kinerja organisasi akan semakin baik danterarah sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisien. 2) Kegunaan anggaran bagi lembaga Negara: a) Pengendalian Legislatif (DPR) terhadap eksekutif (Presiden) jika anggaran telah diundangkan oleh legislatif maka estimasi pengeluaran yang ada dalam anggaran akan menjadi patokan tertinggi yang tidak boleh dilanggar oleh presiden, b) Pengendalian Eksekutif (Persiden) terhadapa bawahannya (menteri gubernur dan seterusnya). Adapun fungsi anggaran adalah: 1) Fungsi pelaksanaan. Anggaran merupakan salah satu pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dalam dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama, 2) Fungsi Perencanaan. Anggaran memberikan gambaran dan ilustrasi yang jelas dalam masalah unit dan uang suatu perusahaan atau organisasi, 3) Fungsi Penawaran. Anggaran merupakan salah satu alat pengawasan atau pengendalian. Secara lebih rinci dapat memberikan informasi bahwa ruang lingkup keuangan daerah termasuk hal-hal dibawah ini: 1) Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, 3) Penerimaan daerah, adalah total uang yang masuk ke kas daerah, 4) Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah, 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang yang berasal dari perusahaan daerah, 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut: 1) Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan, 2) Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba *(income statement)* dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya, 3) Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana, 4) Akuntansi pemerintahanan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan, 5) Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal, 6) Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Sistem pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah: 1) *Single Entry.* Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan satu kali, 2) *Double Entry,* Sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debit dan kredit. Sistem pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, 3) *Triple entry,* metode pencatatan *triple entry* merupakan pengembangan dari metode *double Entry*.

Setelah memahami sistem pencatatan, masih terdapat satu hal lagi yang penting dalam proses pencatatan, yaitu masalah pengakuan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam jurnal. Untuk menentukan kapan transaksi dicatat, maka digunakan pengakuan atas transaksi akuntansi antara lain: 1) Basis

ISSN: 0216-9533 (Print)
ISSN: 2549-6182 (Online)

Kas (*Cash Basis)*, menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas, 2) Basis Akrual (*Accrual Basis)*, Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, 3) Basis Kas Modifikasion (*Modified Acrual Basis*), Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual, 4) Basis Akrual Modifikasion (*Modified Acrual Basis*), Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi pertimbangan kepraktisan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan elemen-elemen dan indkator sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut: a) Transaksi, transaksi merupakan bagian yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data, dokumen, atau bukti pendukung dalam kegiatan operasi entitas, b) Jurnal, buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologi (urut waktu) yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya, c) Buku besar, buku besar merupakan suatu buku yang berisi kesimpuloan rekening atau perkiraan yang telah dicatat didalam jurnal, d) Neraca saldo, neraca saldo merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang mempertanyai pada suatu periode tertentu, e) Jurnal Penyesuaian, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan disusun agar menghasilkan keterkaitan yang tepat antara pendapatan dan belanja/biaya, f) Laporan keuangan, laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, g) Jurnal penutup, Jurnal penutup dilakukan setelah laporan keuangan disusun. Biasanya dilakukan pada akhir periode anggaran tahunan.

Indikator sistem akuntansi keuangan daerah yaitu a) Kesesuaian sistem dengan SAP, b) Pengidentifikasian transaksi, c) Pencatatan transaksi, d) Bukti disetiap transaksi, e) Pencatatan kronologis, f) Pengklasifikasian transaksi, g) Laporan keuangan setiap periode, h) Pelaporan yang konsisten dan periode.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018), adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Bupati Bagian Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun waktu penelitian dua bulan.

Sumber data penelitian ini adalah 1) Data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli. 2) Data sekunder, data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer, yang berasal dari pihak yang telah menggunakan atau atau mempublikasikannya. Data sekunder juga disebut data pendukung karena diperoleh dari sumber lain seperti

berupa dokumen, observasi, dan foto. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 1) Riset Lapangan, yaitu mengumpulkan data-data primer dengan datang langsung ke kantor Bupati Kabupaten Manggarai Barat, kemudian melakukan: a) Wawancara, b) Dokumentasi, dan c) Observasi, 2) Riset Pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

Metode analisis data melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data sintetis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan yang terakhir membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan sebagai berikut: 1) Mengorganisir data, 2) Penyederhanaan data, 3) Proses analisis data, 4) Interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat dalam pelaporan keuangan saat ini telah berpedoman pada Pemendagri No 64 tahun 2013 dengan melaksanakan tata usaha keuangan daerah dengan pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasianal, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Untuk menjalankan segala kebijakan diatas secara keseluruhan dengan optimal, disini peneliti perlu mengetahui alasan mengapa kebijakan tersebut dibuat. Ketika ditanya pada kepala sub bidang akuntansi di BPKD Kabupaten Manggarai Barat yang bernama Rikardus H. Kumat melalui wawancara beliau mengungkapkan: alasan utama mengapa kebijakan ini perlu diterapkan adalah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan pemerintah khsusnya di Kabupaten Manggarai Barat. Dengan menerapkan kebijakan ini, secara tidak langsung sistem pengelolaan keuangan kita akan berjalan dengan baik dan benar."

Menurut kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabuaten Manggarai Barat bapak Salvador Pinto mengungkap bahwa kita merasa perlu menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Pendapat tersebut diatas hampir senada dengan yang diungkapkan oleh salah seorang staf akuntansi dimana dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dijalankan dengan baik guna untuk mendapat hasil yang lebih maksimal.

Ciri utama SIMDA keuangan adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. Dalam mengelola laporan keuangan, BPKD Kabupaten Manggarai Barat sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi SIMDA Keuangan ini karena dapat memudahkan pegawai dalam menyusun laporan keuangannya, staf keuangan yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan tinggal menginput data-data transaksi kedalam jurnal yang sudah terintegrasi langsung untuk membuat laporan keuangan. Aplikasi tersebut telah mencakup keseluruhan dari proses akuntansi, mulai dari pencatatan yaitu memasukkan/menginput transaksi sesuai dengan tanggal terjadinya kemudian diolah secara otomatis untuk menuju ke proses selanjutnya hingga membentuk sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat telah berjalan dengan baik yaitu untuk mendapatkan kualitas dan kemampuan dalam hal penyusunan laporan keuangan serta keinginan dalam evektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Adapun kondisi Laporan Keuangan BPKD Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut:

Tabel 1. BPKD Kabupaten Manggarai Barat LRA dan Pendapatan Belanja Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Jumlah Pendapatan	1,162,831,056	1,116,059,651	1,163,705,988
2	Jumlah Belanja dan Transfer	1,235,619,708	1,151,092,170	1,151,092,170
3	Surplus/Defisit	(72,788,652)	(35,032,519)	4,179,110
4	Pembiayaan Netto	72,788,652	72,798,534	73,609,541
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0.00	37,766,015	77,788,652

Sumber: Data Sekunder (2021)

Berdasarkan tabel 1, menunjukan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat. Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.

Tabel 2. BPKD Kabupaten Manggarai Barat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2020

No	Uraian	2020	2019
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	77,788,652	73,549,840
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	77,788,652	73,549,840
3	**Subtotal (1 - 2)**	**0.00**	**0.00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	37,766,015	77,788,652
5	**Subtotal (3 + 4)**	**37,766,015**	**77,788,652**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0.00	0.00
7	Lain-lain	0.00	0.00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	**37,766,015**	**77,788,652**

Sumber: Data Sekunder (2021)

Berdasarkan tabel 2 menunjukan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3. BPKD Kabupaten Manggarai Barat Laporan Operasional Per 31 Desember 2020

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Jumlah Pendapatan-LO	1,145,435,040	1,168,153,879	(22,718,838)
2	Jumlah Beban	1,071,968,681	1,093,653,358	(21,684,676)
3	Surplus/Defisit dari Operasi	73,466,359	74,500,521	(1,034,161)
4	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	71,585,890	70,731,266	854,624
4	Pos Luar Biasa	(29,485,929)	(2,292,267)	(27,193,662)
5	Surplus/Defisit-LO	42,099,961	68,438,999	(26,339,037)

Sumber: Data Sekunder (2021)

Berdasarkan tabel 3, menunjukan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat. Laporan operasional yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan dalam satu periode laporan.

Tabel 4. BPKD Kabupaten Manggarai Barat Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2021

No	Uraian	2020	2019
1	Ekuitas Awal	2,019,493,908	2,000,242,862
2	Surplus/Defisit-LO	42,099,961	68,438,999
3	Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0.00	0.00
4	Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
5	Selisih Evalusia Aset Tetap	90,240,337	0.00
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	(15,910,092)	(49,187,953)
7	Ekuitas Akhir	2,135,924,115)	2,019,493,908)

Sumber: Data Sekunder (2021)

Berdasarkan tabel 4, menunjukan Laporan Perubahan Ekuitas pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat. Laporan perubahan ekuitas yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Tabel 5. BPKD Kabupaten Manggarai Barat Neraca Per 31 Desember 2021

No	Uraian	2020	2019
1	Aset Lancar	95,241,555	147,614,245
2	Investasi Jangka Panjang	81,409,974	76,021,927
3	Aset Tetap	1,927,921,800	1,779,917,523
4	Aset Lainnya	33,558,900	41,177,805
5	Jumlah Aset	2,138,132,230	2,044,731,502
6	Jumlah Kewajiban	2,208,114	25,237,593
7	Ekuitas	2,135,924,115	2,019,493,908
8	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2,138,132,230	2,044,731,502

Sumber: Data Sekunder (2021)

Berdasarkan tabel 5, menunjukan Neraca pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat dimana neraca diatas disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing- masing.

Tabel 6. BPKD Kabupaten Manggarai Barat Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2021

No	Uraian	2020	2019
1	Jumlah Arus Masuk Kas	911,980,937	1,109,017,383
2	Jumlah Arus Keluar Kas	781,960,692	885,074,859
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	130,020,244	130,020,244
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(167,155,214)	(234,851,054)
5	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	9,882	59,701
6	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1,509,828	7,765,295
7	Kenaikan/Penurunan Kas	(35,615,258)	(3,083,534)
8	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	31,747,919	67,363,177
9	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	149,160	822,932
10	Saldo Akhir Kas di JKN	1,443,017	437,357
11	Saldo Akhir Kas BOS	4,745,852	9,486,514
12	Kas yang dibatasi Penggunaannya	0,00	20,187,583
13	Saldo Akhir Kas	38,085,949	98,297,565

Sumber: Data Sekunder (2021)

Berdasarkan tabel 6, merupakan Laporan Arus Kas pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Pembahasan

Penyajian Laporan Keuangan yang digunakan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan hasil wawancara yaitu terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pelaporan keuangan pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat Dari hasil penelitian diketahui Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daearah (SAKD) yang meningkat. Hasil evaluasi menunjukkan, kualitas dan informasi yang dihasilkan dengan menggunakan aplikasi SIMDA lebih berkualitas yang bisa memepngaruhi pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena SIMDA mampu menghasilkan laporan keuangan dan segala bukti pengdukung yang lebih cepat dan tepat sesuai dengan dengan kebutuhan. Aplikasi SIMDA yang merupakan aplikasi komputer untuk mengolah transaksi keuangan daerah. SIMDA bekerja secara terintegrasi yang dirancang oleh BPKP untuk mengolah data keuangan pemerintah daerah. Aplikasi tersebut telah mencakup keseluruhan dari proses akuntansi, mulai dari pencatatan yaitu memasukkan/menginput transaksi sesuai dengan tanggal terjadinya kemudian diolah secara otomatis untuk menuju ke proses selanjutnya hingga membentuk sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dari hasil informasi informan bahwa implementasi akuntansi keuangan daerah akan berjalan dengan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat Menyusun Laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan Khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara, laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darea (2015), yang dilakukan pada DPPKA Kepulauan Sangihe yang menunjukkan hasil positif setelah diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan, kemudian proses penyajian dalam laporan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat yang bisa meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perhitungan laporan keuangan karena aplikasi SIMDA memiliki rumus-rumus yang telah diprogram secara otomatis. Begitu pula temuan dari Nugraha dan Astuti (2013) yang menunjukkan hasil analisis penerapan SIMDA keuangan pada DisKes Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan rata rata informasi dari biasanya, artinya informasi yang dihasilkan oleh program aplikasi SIMDA keuangan menjadi lebih berkualitas dalam mempengaruhi pengambilan keputusan oleh manajemen. terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah: 1) Penerapan siklus akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan kelengkapan item laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan Laporan keuanga, 2) Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan, yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal. Untuk transaksi-transaksi yang sama, dicatat Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal, setiap bulan atau periode

yang lain akan diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar.

Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, adapun saran yang diharapkan dapat memberi masukan bagi berbagai pihak adalah: 1) Pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan arah pembangunan yang dilaksanakan, dengan cara lebih pro aktif dan lebih intens memberikan petunjuk dan evaluasi kinerja pemerintahan, 2) Diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan, pengumpulan data dan wawancara dengan informan yang kompeten sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih.

DAFTAR PUSTAKA

Andivo, F., & Silvera, D, L. (2020). Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pareso, 2*(2), 365-371.

Baridwan, Z. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Darea, D.W. (2015), *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Dppka Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal EMBA, 3*(2), 114-122.

Edi, Y., & Sabran, A. M. (2020), Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli, *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 5*(1), 1-11.

Munawir. (2018). Sistem Akuntansi. Jakarta: Rieneka Cipta.

Nugraha, H.A., & Astuti, Y.W. (2013), Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen keuangan (SIMDA Keuangan) Dalam pengolahan Data Keuangan di (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Akuntansi Aktual*, *2*(1), 25–33.

Nukak, I, T., Elim, I., & Latjandu, L, D. (2021). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. 5*(1), 155-162.

Soemarso. (2018). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2019). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Zarzani (2020). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada SKPD Pemerintah Aceh. *Jurnal Si-Men, 7* (2), 1-14.